

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Kualitas sumber daya manusia Indonesia yang rendah disebabkan oleh rendahnya kualitas pendidikan yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling keterkaitan secara sinergis, antara lain kebijakan, kurikulum, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, pengelolaan, dan sistem penilaian. Rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia, baik di tingkat dasar, menengah, maupun pendidikan tinggi merupakan salah satu dari empat masalah pokok pendidikan yang banyak dikeluhkan berbagai pihak terutama pemakai lulusan. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagai salah satu lembaga pendidikan yang menghasilkan lulusan calon tenaga kerja terampil dan terdidik menjadi salah satu yang disorot oleh berbagai kalangan dan dianggap perlu ditingkatkan kualitasnya (Hernawan, 2006).

Salah satu pokok masalah yang dihadapi bangsa ini untuk memasuki era globalisasi adalah kondisi Sumber daya manusia (SDM) yang relatif rendah yang dicermati dari pemilikan latar pendidikannya. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan salah satunya seperti yang telah dimuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya mencakup dasar dan tujuan, penyelenggaraan pendidikan termasuk wajib belajar, penjamin kualitas pendidikan serta peran serta masyarakat dalam sistem pendidikan nasional. Kebijakan tersebut dibuat untuk menghasilkan Pendidikan Indonesia

yang baik dan lulusan berkualitas di sektor jenjang pendidikan. Untuk mendukung hal tersebut terlebih dahulu menentukan standar yang harus menjadi acuan pelaksanaan kegiatan pendidikan, maka untuk itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang kemudian dibentuk pula Badan Standar Nasional Pendidikan (BNSP) sebagai badan yang menentukan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi : (1) standar isi, (2) standar proses, (3) standar kompetensi lulusan, (4) standar pendidik dan tenaga kependidikan, (5) standar sarana dan prasarana, (6) standar pengelolaan, (7) standar pembiayaan, dan (8) standar penilaian.

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP), mengamanatkan perlunya menyelaraskan PP dengan dinamika perkembangan masyarakat lokal, nasional, dan global guna mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional. Untuk itu, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa diperlukan komitmen nasional untuk meningkatkan mutu dan daya saing bangsa melalui pengaturan kembali standar kompetensi lulusan, standar isi, standar proses, dan standar penilaian, serta pengaturan kembali kurikulum (Tjahjono, 2014).

Perubahan yang terjadi pada PP tersebut adalah: (1) Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia; (2) pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi; (3) standar proses adalah kriteria

mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan (SKL); (4) standar pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan; (5) Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. (6) Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik (Tjahjono, 2014).

Berdasarkan Keputusan Direktur Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional No: 4294/C5.3/Kep/KU/2009 tentang Penetapan SMK Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) dinyatakan bahwa Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Karanganyar yang masuk dalam Daftar SMK-RSBI adalah SMK Negeri 1 dan SMK Negeri 2. Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk membubarkan RSBI dan mengembalikannya menjadi sekolah regular tidak begitu mempengaruhi *image* sekolah tersebut yang sudah terlanjur dicap sebagai RSBI. SMK Negeri 1 Karanganyar memiliki 6 program keahlian yang semuanya memperoleh Akreditasi A yaitu Administrasi Perkantoran, Akuntansi, Pemasaran, Busana Butik, Usaha Perjalanan Wisata, dan Multimedia.

Selain SMK Negeri 1 Karanganyar, SMK Satya Karya adalah SMK swasta unggulan yang memiliki jumlah animo siswa paling tinggi setiap tahunnya di Kabupaten Karanganyar. SMK Satya Karya memiliki 4 program keahlian, 3 program keahlian memperoleh Akreditasi A yaitu Teknik Pemesinan, Teknik Kendaraan Ringan, dan Teknik Gambar Bangunan, sedangkan untuk program keahlian Teknik Instalasi Tenaga Listrik masih memperoleh nilai Akreditasi B. SMK Negeri 1 Karanganyar dan SMK Satya Karya Karanganyar mampu memperoleh nilai Akreditasi A dengan predikat amat baik, namun masih ada beberapa standar penilaian yang mendapatkan nilai B pada kedua sekolah tersebut diantaranya adalah standar pengelolaan. Standar pengelolaan merupakan otaknya manajemen sekolah karena meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi, sehingga peneliti tertarik untuk mengetahui apa yang menjadi kendala pada standar pengelolaan di SMK Negeri 1 Karanganyar dan SMK Satya Karya Karanganyar.

Sejalan dengan adanya perubahan PP Standar Nasional Pendidikan, maka diperlukan suatu tinjauan atau evaluasi tentang kinerja Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Karanganyar ditinjau dari 8 indikator Standar Nasional Pendidikan (SNP), sehingga dapat diperoleh data yang terbaru tentang pelaksanaan SMK yang sesuai dengan perubahan tersebut.

## B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kinerja Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Karanganyar ditinjau dari 8 Standar Nasional Pendidikan ?
2. Bagaimana nilai rata-rata kinerja Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Karanganyar ditinjau dari keseluruhan Standar Nasional Pendidikan?

### C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengevaluasi kinerja Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Karanganyar berdasarkan Standar Nasional Pendidikan.
2. Menganalisis nilai rata-rata kinerja Sekolah Menengah Kejuruan di Kabupaten Karanganyar ditinjau dari keseluruhan Standar Nasional Pendidikan.

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Melalui penelitian ini, peneliti dapat mengembangkan teori yang diperoleh di perkuliahan khususnya akuntansi sektor publik. Bagi peneliti yang akan datang, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi atau kajian pustaka untuk melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktis

Bagi para pemimpin di lingkungan pendidikan menengah khususnya pada jenjang SMK di Kabupaten Karanganyar, hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kebijakan dalam meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kinerja sekolah menengah kejuruan.